



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUNANTO HERDIAWAN
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 457538

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 52 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 308 m2/164 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 581 m2/120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.070.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. MOTOR, VESPA S125 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 305.000.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. 1.280.000.182

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.443.295.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 9.448.295.182



III. HUTANG

Rp. 1.827.581.495

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.620.713.687

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.